

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **Musrenbang di Kabupaten Gunungkidul**

Amanat undang-undang dalam penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran akan merubah paradigma pada proses perencanaan dan penganggaran mulai dari tingkat bawah yaitu dusun, desa, kecamatan, kabupaten, regional maupun nasional. Amanat tersebut yaitu Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..

Undang-Undang 25 Tahun 2004 mengamanatkan dalam penyusunan RKPD, daerah wajib menyelenggarakan forum musrenbang secara berjenjang mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten, sampai tingkat provinsi secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders*. Musrenbang merupakan bagian dalam penyusunan RKPD, proses awal dimulai dari draft perumusan Rancangan Awal RKPD yang disusun oleh tim perumus berkedudukan di Bappeda.

Tugas tim perumus adalah membuat perumusan masalah pembangunan daerah untuk satu tahun kedepan, dengan memadukan 4 (empat) faktor yaitu 1) Pengolahan data dan informasi; 2) Pokok-pokok pikiran DPRD; 3) Evaluasi RKPD, RPJMD tahun lalu; 4) Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Keempat hal

tersebut dirumuskan/diformulasikan menjadi draft rancangan awal RKPD dan sebelum disahkan menjadi Rancangan Awal RKPD harus konsultasi publik melalui forum konsultasi publik. Konsultasi publik bertujuan untuk mencari masukan dari semua *stakeholders* tentang Rancangan Awal RKPD. Masukan dari berbagai stakeholdes untuk penyempurnaan draft rancangan awal dan disahkan menjadi Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD merupakan bahan bagi masyarakat dan SKPD dalam melaksanakan musrenbang secara berjenjang untuk menghasilkan dokumen perencanaan daerah dalam waktu satu tahun anggaran.

Proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan RKPD dilakukan melalui musrenbang dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

- Tahap I : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)
- Tahap II : Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan (Musrenbang Kecamatan)
- Tahap III : Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)/Forum Gabungan SKPD
- Tahap IV : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kabupaten)

### **V.1. Musrenbang Desa**

Perencanaan pembangunan tingkat dusun dan desa wajib dilakukan secara partisipatif melalui musrenbang. Dokumen perencanaan di desa dengan jangka

menengah yaitu RPJM Desa, dan dokumen jangka pendek/tahunan yaitu RKP Desa. RKPDesa merupakan sebagai bahan dalam pengusulan program kegiatan pada musrenbang kecamatan, karena dokumen RKPDesa ada dua bagian yaitu : 1) program kegiatan skala desa yang akan dijabarkan ke dalam APB Desa sesuai tugas dan kewenangan desa, antara lain Alokasi Dana Desa, Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan keuangan provinsi dan kabupaten kepada desa, dan Proyeksi pendapatan asli desa; 2) program kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat sesuai kewenangannya melalui forum musrenbang.

Forum perencanaan pembangunan melalui musrenbang dimulai pada pelaksanaan diskusi kelompok dalam musrenbang desa, diskusi tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok Pemerintahan, sosial dan budaya, kelompok Fisik dan prasarana, dan kelompok ekonomi. Peserta musrenbang desa terdiri dari tokoh masyarakat, RT/RW, BPD, Kepala Desa dan Perangkatnya, Kepala Dusun, LPMD, PKK, Karangtaruna, Kelompok Masyarakat dan organisasi massa, LSM, dan Dunia usaha.

Pembahasan usulan program kegiatan pada sidang kelompok disinkronkan kondisi wilayah desa dengan Tema Prioritas Kabupaten pada tahun perencanaan n+1 dan Rancangan Awal RKPD. Rancangan awal RKPD didalamnya memuat draft matrik program kegiatan SKPD/Rancangan awal renja SKPD. Rancangan awal tersebut sangatlah membantu bagi desa dalam pengusulan program kegiatan dihasilkan oleh musrenbang desa seperti disampaikan Perencana Kecamatan

Panggung, Kabupaten Gunungkidul oleh Bapak Sugeng Prihartanto, S.IP, personil kecamatan mendampingi musrenbang desa sebagai berikut :

“Ada dispariatis kualitas perencanaan diawal-awal ketika musrenbangdes, musrenbang kecamatan sampai forum SKPD/forum gabungan SKPD karena informasi yang diterima, masalahnya hanya komunikasi, koordinasi dan informasi sudah diperbaiki oleh teman-teman dari Bappeda melalui penawaran program kegiatan SKPD melalui Rancangan Awal Renja SKPD tinggal desa dan kecamatan bisa menerima umpan tersebut tidak, dan juga adanya informasi pembangunan, dan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. Ketidaksesuaian usulan sudah ditanggulangi dengan rancangan tersebut dan membuat usulan dari desa lebih mendekati prioritas dari rancangan awal Renja SKPD tersebut. ” (wawancara tanggal 8-9-2016)



Gambar 5.1

Wawancara dengan Perencana Kecamatan Panggang, Gunungkidul.

Hasil yang diperoleh dalam musrenbang desa yang tertuang dalam dokumen RKPDesa : 1) Program kegiatan yang dilaksanakan dalam skala desa melalui

Rancangan APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa, 2) Evaluasi program kegiatan dari RKPDesa tahun lalu yang sedang/sudah dilaksanakan, 3) Rencana program kegiatan yang akan dibawa dalam musrenbang kecamatan melalui usulan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBD, dan Berita acara peserta/wakil-wakil desa yang akan hadir dalam musrenbang kecamatan minimal 7 orang meliputi Kepala Desa, Perwakilan BPD, Ketua LPMD, dan 4 orang tokoh masyarakat.

Pelaksanaan musrenbang desa merupakan tanggungjawab Kepala Desa dengan dipandu camat selaku kepanjangan tangan bupati di wilayah kecamatan, kegiatan tersebut dibantu oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kasi Pemerintahan selaku sektor yang membidangi. Kualitas usulan yang dihasilkan oleh musrenbang desa akan berdampak pada usulan yang akan dibawa pada level perencanaan selanjutnya di musrenbang kecamatan.

Seperti yang diutarakan didepan Rancangan awal RKPD sangatlah membantu desa dan kecamatan dalam menghasilkan usulan untuk dibawa kedalam musrenbang kejenjang di atasnya, berikut adalah matrik Rancangan awal RKPD bidang Fisik dan Prasarana meliputi SKPD Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; dan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun 2013 s/d 2015 adalah sebagai berikut :

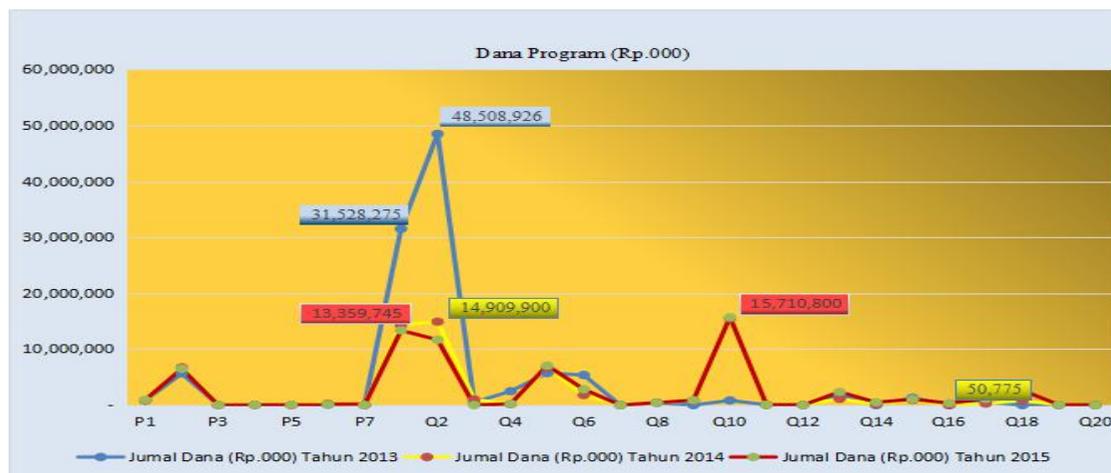
TABEL 5.1  
PROGRAM PADA RANCANGAN AWAL RKP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM

No.	Nama Program	Jumlah Dana (Rp.000)		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	830.450	849.100	934.750
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.651.365	6.740.865	6.525.315
3.	Peningkatan disiplin aparatur	-	-	-
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000	35.000	35.000
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.500	6.500	35.000
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	76.505	238.005	172.955
7.	Kelembagaan dan ketatalaksanaan	-	-	-
8.	Pembangunan jalan dan jembatan	31.528.275	14.333.620	13.359.745
9.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	48.508.926	14.909.900	11.684.400
10.	Tanggap darurat jalan dan jembatan	513.025	1.013.025	-
11.	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.483.925	173.825	233.825
12.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	5.732.945	6.667.823	7.073.930
13.	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	5.375.550	1.810.050	2.825.550
14.	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	-	-	-
15.	Pengendalian Banjir	437.775	437.775	437.775
16.	Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	787.725	875.185
17.	Pembangunan infrastruktur perdesaan	837.650	15.483.300	15.710.800
18.	Pelayanan Perijinan	55.000	55.000	55.000
19.	Tanggap darurat bidang kecipta karya	-	-	-
20.	Lingkungan Sehat Perumahan	1.717.320	1.117.320	2.367.320
21.	Perencanaan Tata Ruang	-	150.000	500.000
22.	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.314.534	909.384	1.046.944
23.	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	-	-	350.000
24.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	577.725	277.400	1.104.900
25.	Pembangunan turap/talud/bronjong	-	817.100	2.658.750
26.	Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	-	50.775	50.775
27.	Pengembangan perumahan	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>105.682.470</b>	<b>117.587.717</b>	<b>68.037.919</b>

Sumber : Bappeda, Kab. Gunungkidul, 2016 (diolah)

Pada tabel 5.1 dapat dilihat SKPD DPU selama 3 (tiga) tahun yaitu 2013, 2014, dan 2015 program kegiatan terbesar pada tahun 2013 yaitu program “Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan” dengan jumlah Rp.48.508.926.000,00 tahun 2014 program terbesar pada program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan jumlah Rp.15.483.300.000,00 dilanjutkan tahun 2015 masih sama seperti tahun 2014 yaitu program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan nominal Rp.15.710.800.000,00, apabila dibuat grafik sebagai berikut:

GRAFIK 5.1  
PROGRAM PADA RANCANGAN AWAL RKP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM



Sumber : Bappeda, Kab. Gunungkidul, 2016 (diolah)

Keterangan :

P1 = Pelayanan administrasi perkantoran

P2 = Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

P3 = Peningkatan disiplin aparatur

P4 = Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

P5 = Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

P6 = Peningkatan kualitas pelayanan publik

P7 = Kelembagaan dan ketatalaksanaan

Q1 = Pembangunan jalan dan jembatan

Q2 = Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Q3 = Tanggap darurat jalan dan jembatan

Q4 = Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Q5 = Pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Q6 = Penyediaan dan pengelolaan air baku

Q7 = Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Q8 = Pengendalian banjir

Q9 = Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Q10 = Pembangunan infrastruktur perdesaan

Q11 = Pelayanan perijinan

Q12 = Tanggap darurat bidang kecepta karya

Q13 = Lingkungan sehat perumahan

Q14 = Perencanaan tata ruang

Q15 = Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Q16 = Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Q17 = Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Q18 = Pembangunan tarup/talud/bronjong

Q19 = Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

Q20 = Pengembangan perumahan

Q21 = Perencanaan tata ruang

Program terbesar seperti grafik diatas merupakan program yang diarahkan untuk pembangunan sarana prasarana terutama pemeliharaan jalan dan jembatan di desa kabupaten dalam rangka mendukung tema prioritas pembangunan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Program pembangunan infrastruktur perdesaan diharapkan kedepan infrstruktur perdesaan bisa tercukupi untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat melalui tema dan prioritas pembangunan daerah.

Peningkatan program kegiatan pada kegiatan teknis SKPD pada tahun 2014 boleh dibilang banyak dalam tahun 2013-2015, program tersebut adalah program perencanaan tata ruang, program pembangunan turap/talud/bronjong, dan program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan. Program perencanaan tata ruang dengan kegiatan di dalamnya yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang, dengan harapan gunungkidul mempunyai wadah dalam perencanaan tata ruang sebagai imbas dari gunungkidul bagian dari wilayah karst yang harus dilindungi kawasan-kawasan karst bebatuan di wilayah selatan gunungkidul.

Penambahan program pembangunan turap/talud/bronjong dengan harapan adanya kegiatan pembangunan talud/bronjong dari dana alokasi khusus bidang irigasi yang ada di gunungkidul. Program inspeksi kondisi jalan diharapkan adanya pendataan dan inspeksi kondisi jalan dan jembatan yang akurat sebagai pendukung perencanaan kebinamargaan. Berikut ini adalah jumlah kegiatan pada Rancangan awal RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2015 seperti pada tabel berikut :

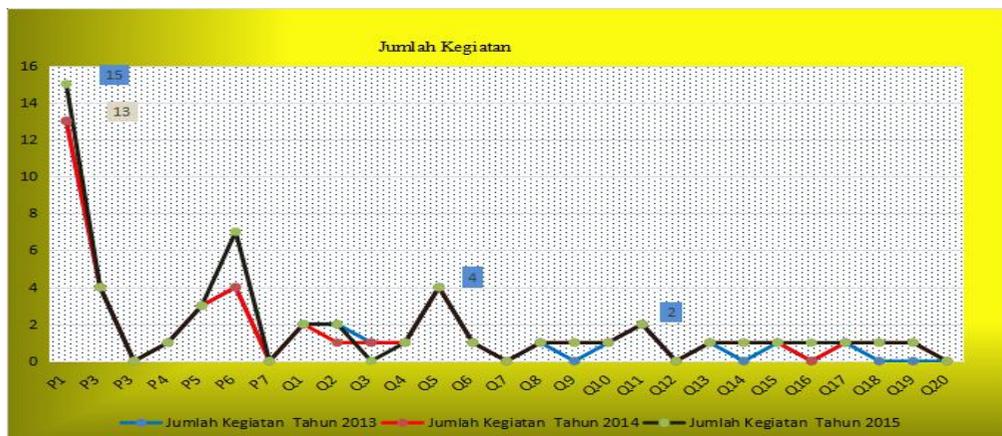
TABEL 5.2  
 JUMLAH KEGIATAN PADA RANCANGAN AWAL RKPD  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
 SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM

No.	Nama Program/Kode	Jumlah Kegiatan		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	13	15
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	4	4
3.	Peningkatan disiplin aparatur	0	0	0
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	1
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3	3	3
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4	4	7
7.	Kelembagaan dan ketatalaksanaan	0	0	0
8.	Pembangunan jalan dan jembatan	2	2	2
9.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2	1	2
10.	Tanggap darurat jalan dan jembatan	1	1	0
11.	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1	1	1
12.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	4	4	4
13.	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1	1	1
14.	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	0	0	0
15.	Pengendalian Banjir	1	1	1
16.	Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0	1	1
17.	Pembangunan infrastruktur perdesaan	1	1	1
18.	Pelayanan Perijinan	2	2	2
19.	Tanggap darurat bidang kecipta karya	0	0	0
20.	Lingkungan Sehat Perumahan	1	1	1
21.	Perencanaan Tata Ruang	0	1	1
22.	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1	1	1
23.	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	0	0	1
24.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1	1	1
25.	Pembangunan turap/talud/bronjong	0	1	1
26.	Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	0	1	1
27.	Pengembangan perumahan	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>52</b>

Sumber : Bappeda, Kab. Gunungkidul, 2016 (diolah)

Tabel 5.2 menunjukkan jumlah kegiatan tertinggi pada “Pelayanan administrasi perkantoran” dengan jumlah 15 kegiatan pada tahun 2015, dan pada tahun 2013, 2014 berjumlah 13 jenis kegiatan. Nominal dana program tertinggi tidak harus mempunyai jumlah kegiatan terbanyak, dan kegiatan tersebut ditujukan untuk menunjang aktivitas ke rumah tangga/ kegiatan internal pada SKPD tersebut, serta untuk mendukung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Secara jelas gambaran program dan jumlah kegiatan pada SKPD DPU terpampang pada kedua grafik sebagai berikut :

GRAFIK 5.2  
JUMLAH KEGIATAN PADA RANCANGAN AWAL RKPD  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM



Sumber : Bappeda, Kab. Gunungkidul, 2016 (diolah)

Keterangan :

P1 = Pelayanan administrasi perkantoran  
P2 = Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
P3 = Peningkatan disiplin aparatur  
P4 = Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  
P5 = Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  
P6 = Peningkatan kualitas pelayanan publik  
P7 = Kelembagaan dan ketatalaksanaan  
Q1 = Pembangunan jalan dan jembatan  
Q2 = Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan  
Q3 = Tanggap darurat jalan dan jembatan  
Q4 = Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan  
Q5 = Pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya  
Q6 = Penyediaan dan pengelolaan air baku

Q7 = Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah  
Q8 = Pengendalian banjir  
Q9 = Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh  
Q10 = Pembangunan infrastruktur perdesaan  
Q11 = Pelayanan perijinan  
Q12 = Tanggap darurat bidang keciptaan karya  
Q13 = Lingkungan sehat perumahan  
Q14 = Perencanaan tata ruang  
Q15 = Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  
Q16 = Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
Q17 = Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong  
Q18 = Pembangunan tarup/talud/bronjong  
Q19 = Inspeksi kondisi jalan dan jembatan  
Q20 = Pengembangan perumahan  
Q21 = Perencanaan tata ruang

SKPD lainnya pada bidang fisik dan prasarana adalah Dishubkominfo, beda SKPD beda pula tugas dan fungsi dalam melaksanakan pembangunan, Dishubkominfo banyak berkiprah pada sarana prasarana dan fasilitas perhubungan, sistem transportasi, pelayanan angkutan umum/barang, pengendalian pengamanan lalu lintas, komunikasi dan media massa. Tabel dibawah ini merupakan Rancangan awal RKPD yang merupakan draft matrik rancangan awal renja SKPD Dishubkominfo tahun 2013-2015 dengan rincian program kegiatan sebagai berikut :

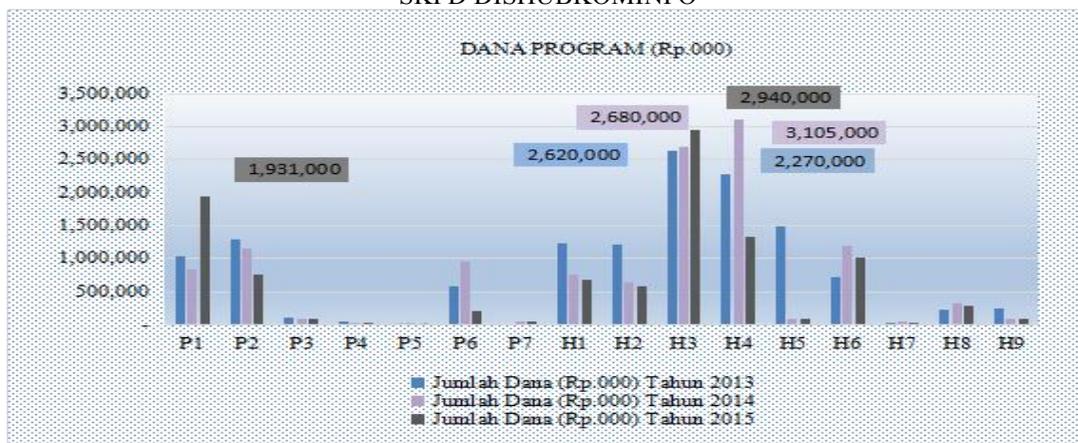
TABEL 5.3  
PROGRAM PADA RANCANGAN AWAL RKPD  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
SKPD DISHUBKOMINFO

No.	Nama Program	Jumlah Dana (Rp.000)		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran	1.020.500	838.500	1.931.000
2	Peningkatan Sarana Prasana Aparatur	1.285.000	1.143.500	752.500
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	97.000	78.000	87.500
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000	17.000	21.500
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.000	16.000	14.000
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik	573.000	944.000	194.500
7	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	0	40.000	40.500
8	Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan	1.222.500	762.500	665.000
9	Peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang	1.204.500	637.000	572.800
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2.620.000	2.680.000	2.940.000
11	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.270.000	3.105.000	1.330.000
12	Penataan Sistem Transportasi	1.475.000	75.000	75.000
13	Pembangunan komunikasi, informasi dan media massa	710.000	1.185.000	1.010.000
14	Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Infomasi	25.000	45.000	25.000
15	Kerjasama informasi dengan mas media	213500	315.000	280.000
16	Prengembangan pos dan Telekomunikasi	245500	75.000	75.000
	<b>Jumlah</b>	<b>13.022.500</b>	<b>11.956.500</b>	<b>10.014.300</b>

Sumber : Bappeda, Kab. Gunungkidul, 2016 (diolah)

Program rancangan awal RKPD pada SKPD Dishubkominfo pada tahun 2013-2015 seperti tabel 5.3 diatas, nominal program terbesar tahun 2013 pada program pembangunan sarana prasarana perhubungan dengan nominal Rp.2.620.000.000,00, tahun 2014 pada program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan nominal Rp.3.105.000.000,00 tahun 2015 masih sama seperti tahun 2013 dengan nominal Rp.2.940.000.000,00 program pembangunan sarana prasarana terminal nantinya diperuntukan pada kegiatan pembangunan terminal tipe A dan terminal tipe C. Secara jelas program terbesar pada rancangan awal akan bisa kita lihat seperti pada grafik sebagai berikut :

GRAFIK 5.3  
PROGRAM PADA RANCANGAN AWAL RKPD  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
SKPD DISHUBKOMINFO



Sumber : Bappeda, Kab. Gunungkidul, 2016 (diolah)

Keterangan :

P1= Pelayanan administrasi perkantoran

P2= Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

P3= Peningkatan disiplin aparatur

P4= Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

P5= Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

P6= Peningkatan kualitas pelayanan publik

P7= Kelembagaan dan ketatalaksanaan

H1= Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan

H2= Peningkatan pelayanan angkutan umum dan Barang

H3= Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

H4= Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

H5= Penataan Sistem Transportasi

H6= Pembangunan komunikasi, informasi dan media massa

H7= Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

H8= Kerjasama informasi dengan mass media

H9= Pengembangan pos dan Telekomunikasi

Rancangan awal RKPD dilihat dari jumlah program dan kegiatan untuk mengetahui seberapa besar jumlah program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD Dishubkominfo. Berikut merupakan jumlah kegiatan pada SKPD Dishubkominfo tahun 2013-2015 dalam Rancangan awal RKPD pada draft matrik rancangan awal renja SKPD sebagai berikut :

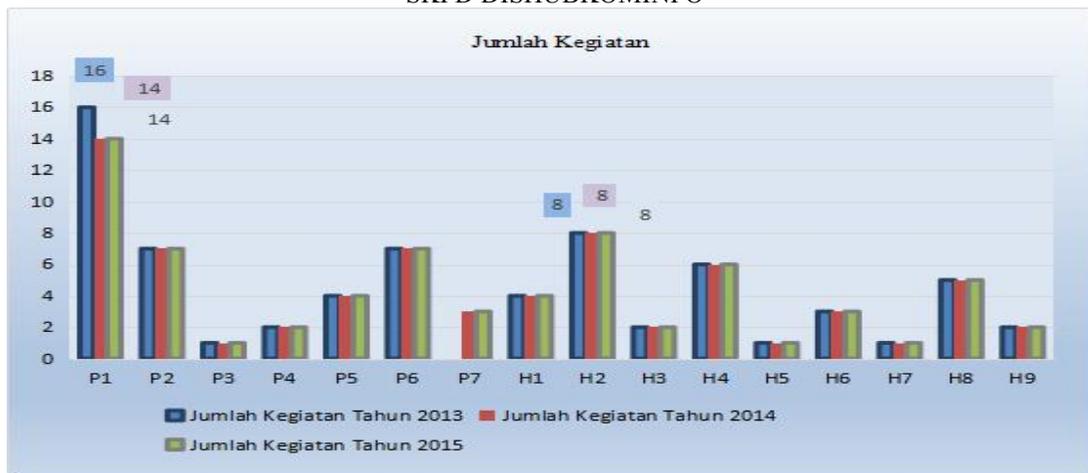
TABEL 5.4  
JUMLAH KEGIATAN PADA RANCANGAN AWAL RKPD  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
SKPD DISHUBKOMINFO

No.	Nama Program	Jumlah Kegiatan		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran	16	14	14
2	Peningkatan Sarana Prasana Aparatur	7	7	7
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1	1
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	2	2
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	4	4
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik	7	7	7
7	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	0	3	3
8	Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan	4	4	4
9	Peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang	8	8	8
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2	2	2
11	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	6	6	6
12	Penataan Sistem Transportasi	1	1	1
13	Pembangunan komunikasi, informasi dan informasi	3	3	3
14	Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Infromasi	1	1	1
15	Kerjasama informasi dengan mas media	5	5	5
16	Prengembangan pos dan Telekomunikasi	2	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>69</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

Sumber : Bappeda, Kab. Gunungkidul, 2016 (diolah)

Tabel 5.4 diatas merupakan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dishubkominfo pada tahun 2013-2015, adapun jumlah terbanyak masih pada program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 16 jenis kegiatan pada tahun 2013 dan 14 jenis kegiatan pada tahun 2014 dan 2015. Urutan kedua jumlah kegiatan terbanyak pada program Peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang dengan jumlah 8 jenis kegiatan berturut-turut dari tahun 2013-2015, program tersebut nantinya untuk pelaksanaan kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang melalui sarana prasarananya maupun operasional uji kendaraannya. Kedua tabel 5.3, 5.4 diatas secara jelas bisa tergambar dalam grafik sebagai berikut :

GRAFIK 5.4  
JUMLAH KEGIATAN PADA RANCANGAN AWAL RKPD  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
SKPD DISHUBKOMINFO



Sumber : BAPPEDA, Kab. Gunungkidul, 2016 (diolah).

Keterangan :

P1= Pelayanan administrasi perkantoran  
P2 = Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
P3= Peningkatan disiplin aparatur  
P4= Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  
P5= Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  
P6= Peningkatan kualitas pelayanan publik  
P7= Kelembagaan dan ketatalaksanaan  
H1= Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan  
H2= Peningkatan pelayanan angkutan umum dan Barang

H3= Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan  
H4= Pengendalian dan pengamanan lalu lintas  
H5= Penataan Sistem Transportasi  
H6= Pembangunan komunikasi, informasi dan media massa  
H7= Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi  
H8= Kerjasama informasi dengan mass media  
H9= Pengembangan pos dan Telekomunikasi

Jumlah besaran program dan jumlah kegiatan pada Rancangan awal RKPD yang merupakan draft matrik rancangan awal renja SKPD tahun 2013-2015 pada SKPD Kapedal dapat dilihat pada kedua tabel sebagai berikut :

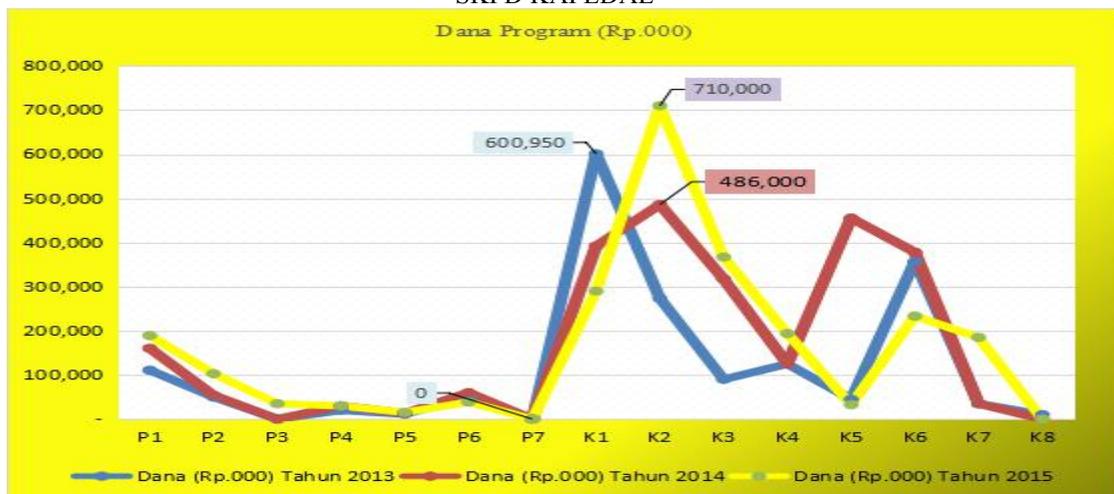
TABEL 5.5  
PROGRAM PADA RANCANGAN AWAL RKPD  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
SKPD KAPEDAL

No.	Nama Program	Dana (Rp.000)		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	110.800	160.425	189.250
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000	53.900	103.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	35.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000	30.000	30.000
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.500	13.250	15.250
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik	49.500	60.000	38.500
7	Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan	0	0	0
8	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	600.950	392.000	290.000
9	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	273.500	486.000	710.000
10	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	90.000	317.500	367.110
11	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	125.000	125.000	194.000
12	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	45.000	455.500	32.500
13	Peningkatan Pengendalian Polusi	357.000	378.000	233.390
14	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	35.000	35.000	185.000
15	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	10.000	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.768.250</b>	<b>2.506.575</b>	<b>2.388.000</b>

Sumber : BAPPEDA, Kab. Gunungkidul, 2016. (diolah)

Tabel 5.4 diatas menunjukkan jumlah dana program dari tahun 2013-2015 yang terbesar di SKPD Kapedal bervariasi setiap tahun berubah-ubah pada tahun 2013 terbesar pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan jumlah dana sebesar Rp.600.950.000,00 pada tahun 2014 jumlah dana terbesar pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp.486.000.000,00. pada tahun 2015 jumlah dana terbesar pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp.710.000.000,00 dan secara jelas dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

GRAFIK 5.5  
PROGRAM PADA RANCANGAN AWAL RKPD  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
SKPD KAPEDAL



Sumber : Bappeda Kab. Gunungkidul, 2016 (diolah)

Keterangan :

P1.= Pelayanan administrasi perkantoran

P2.= Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

P3 = Peningkatan disiplin aparatur

P4 = Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

P5 = Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

P6 = Peningkatan kualitas pelayanan publik

P7 = Kelembagaan dan ketatalaksanaan

K1= Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

K2 = Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

K3= Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

K4= Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

K5= Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup

K6= Peningkatan Pengendalian Polusi

K7= Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

K8= Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Dilihat dari jumlah kegiatan pada program dalam SKPD Kapedal pada tahun 2013-2015 dapat dilihat seperti dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 5.6  
JUMLAH KEGIATAN PADA RANCANGAN AWAL RKPD  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
SKPD KAPEDAL

No.	Program	Jumlah Kegiatan		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	13	13
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	2	2
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	2
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	1
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	4	4
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik	4	7	5
7	Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan			
8	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	1	1
9	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8	8	8
10	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3	3	3
11	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1	1	1
12	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2	2	2
13	Peningkatan Pengendalian Polusi	2	2	2
14	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	1	1	2
15	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1		
	<b>JUMLAH</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>46</b>

Sumber : BAPPEDA, Kab. Gunungkidul, 2016. (diolah)

Jumlah kegiatan pada SKPD Kapedal selama tiga tahun mengalami peningkatan, dan peningkatan terbanyak pada program wajib yang harus dilakukan oleh semua SKPD yaitu program peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kegiatan juga terjadi pada tahun 2015 pada kegiatan peningkatan disiplin aparatur dengan menambah dua jenis kegiatan, serta pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2014. Peningkatan kegiatan pada kegiatan teknis SKPD terjadi pada tahun 2015 pada program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan, kegiatan tersebut merupakan imbas dengan adanya DAK bidang lingkungan hidup yang nantinya bisa dilaksanakan pada SKPD Kapedal. Berikut grafik jumlah kegiatan pada rancangan awal RKPD tahun 2013-2015 SKPD Kapedal sebagai berikut:

GRAFIK 5.6  
JUMLAH KEGIATAN PADA RANCANGAN AWAL RKPD  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 S/D 2015  
SKPD KAPEDAL



Sumber : Bappeda Kab. Gunungkidul, 2016 (diolah)

Keterangan :

P1 = Pelayanan administrasi perkantoran

P2 = Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

P3 = Peningkatan disiplin aparatur

P4 = Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

P5 = Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

P6 = Peningkatan kualitas pelayanan publik

P7 = Kelembagaan dan ketatalaksanaan

K1 = Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

K2 = Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

K3 = Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

K4 = Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

K5 = Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup

K6 = Peningkatan Pengendalian Polusi

K7 = Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

K8 = Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Jumlah kegiatan pada rancangan awal seperti pada grafik 5.5 dan 5.6 diatas pada posisi tiga tahun dari tahun 2013-2015 tidak mengalami perubahan jumlah dana program dan jumlah kegiatan pada Kapedal, hanya pada satu program di tahun 2014 program peningkatan pelayanan publik. Program tersebut berisi program kegiatan internal untuk mendukung kinerja organisasi dengan jumlah kegiatan tujuh jenis antara lain :

1. Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD,
2. Koordinasi perencanaan dan penyusunan rencana kerja SKPD,
3. Monitoring, Evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD,
4. Penyelenggaraan forum SKPD,
5. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)
6. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM),
7. Evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) SKPD.

Kegiatan selain ketujuh kegiatan diatas secara lengkap seperti pada lampiran tulisan ini. Program Kegiatan internal SKPD/kegiatan rutin SKPD pada Rancangan awal RKPD atau dimasing-masing draft matrik rancangan awal renja SKPD bagi desa tidak berfungsi secara langsung dalam rangka masukan dan pertimbangan pada bahan musrenbang desa. Rancangan awal RKPD yang diperlukan bagi desa yaitu program kegiatan teknis pada matrik draft rancangan awal renja SKPD. Hasil musrenbang desa yang sudah mengakomodir matrik draft rancangan awal renja SKPD akan lebih berbobot, dan nantinya akan dibawa pada jenjang forum selanjutnya yaitu musrebang kecamatan.